

Redefinisi Ilmu Hubungan Internasional dalam Perspektif Gender

by Sukawarsini Djelantik

Submission date: 19-Feb-2020 04:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 1260090857

File name: definisi_Ilmu_Hubungan_Internasional_dalam_Perspektif_Gender.pdf (278.69K)

Word count: 7238

Character count: 49469

"REDEFINISI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF GENDER"

Sukawarsini Djelantik¹

sukedj@home.unpar.acid

If you dream about an egalitarian and just society it cannot be created by men alone. You cannot ignore 50% of the population. (Shekhar Pathah)

Abstrak

International politics and international relations are identic with the masculine world. Vast majority of diplomat, soldiers and international organization staffs are man, and only small percentage of them are female. This condition made international relations activities, in political, law-making, diplomacy, war and peace are describe from male point of view and from male sensitivity. Duty to defend national interests is associate with men during war to defend glory and honor. In many cultures war heroes are highly respected and honored in world history. Sacrifice in war also considered as the highest form of patriotism, an act where women position is aside. If this description is remain, global issues and international politics would merely focused on realist point of view, that is viewing International Relations in terms of power and war. This paper argues that the study of international relations should be redifine to include gender point of view. Related to issue on non-traditional issue, gender analysys is became more significant in the study of international relations.

Keywords: *gender; international relations, realist, traditional and non-traditional security.*

Pengantar

Politik internasional dan hubungan internasional selama ini identik dengan dunianya kaum laki-laki. Sebagian besar diplomat, tentara, dan staf badan-badan internasional terdiri atas laki-laki. Selain terdapat sebagian kecil

¹ Makalah ini telah dipresentasikan pada Konferensi Internasional "Gender and Politics" yang diadakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Gajah-Mada, Yogyakarta, 21-24 Januari 2009.

kepala negara atau kepala pemerintahan perempuan, ada sedikit sekali bukti yang menyebutkan bahwa perempuan telah memainkan peran yang besar dalam membentuk politik luar negeri di negara manapun pada abad ke 20 ini. Meskipun benar bahwa jumlah perempuan tidak banyak diwakili di semua jabatan-jabatan tinggi, perempuan juga menghadapi kesulitan-kesulitan tambahan dalam memegang jabatan di politik internasional.

Ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perempuan ketika mencoba untuk memasuki dunia elite pembuat kebijakan luar negeri. Tulisan ini membahas alasan-alasan *mengapa perempuan lebih sering tersisih dari kegiatan merancang kebijakan luar negeri*, sehingga hal ini membentuk *cara berfikir dan sikap kita terhadap politik internasional*. Dengan memfokuskan pada isu-isu yang dianggap politik tingkat tinggi seperti perang dan realpolitik, disiplin ilmu hubungan internasional Barat lebih menyenangi isu yang berdasarkan pada pengalaman Kita dipaksa untuk mempercayai bahwa perang dan politik kekuasaan merupakan aktivitas khusus bagi laki-laki. Peran yang biasanya diasosiasikan dengan perempuan adalah peran-peran domestik seperti reproduksi, mengatur rumah tangga dan bahkan ketika berkiprah dalam kehidupan ekonomi, biasanya dianggap tidak relevan dengan konstruksi tradisional dalam bidang politik luar negeri. Pengalaman perempuan yang diabaikan menyebabkan tidak saja pengecualian terhadap sosok perempuan tetapi juga dalam proses seleksi diri sehingga menyebabkan lebih banyak laki-laki dalam dunia pembuatan kebijakan luar negeri dan dalam bidang pengembangan akademik hubungan internasional. Proses seleksi ini dimulai sejak awal kita diajarkan untuk memikirkan tentang politik internasional.

Jika pengalaman-pengalaman perempuan ingin dimasukkan, maka sebuah upaya mendefinisikan ulang Ilmu Hubungan Internasional juga perlu dilakukan. Maka tulisan ini bertujuan memikirkan kembali bagaimana membentuk disiplin hubungan internasional. Isu gender sebagai salah satu kategori analisis dipakai dengan memasukkan pengalaman perempuan sebagai bagian dari topik dan pembentukan teori. Hirarki gender harus dihilangkan, yaitu hirarki yang lebih mementingkan laki-laki, dengan memasukkan pengetahuan, pengalaman dan sikap terhadap perempuan sebagai bahan kajian. Jika tidak ada perubahan dalam memandang masalah kesetaraan gender dalam hubungan internasional, maka marginalisasi perempuan dalam masalah-masalah yang terkait politik internasional akan terus terjadi.

Gender dan Keamanan Nasional

Pembahasan mengenai hubungan internasional dalam kaitannya dengan keamanan nasional merupakan ranah eksklusif laki-laki. Ketika banyak perempuan membela keamanan nasional memenuhi panggilan untuk melakukan aksi bela negara, tugas tersebut tetap dipandang sebagai dunianya laki-laki. Tugas bela negara diasosiasikan dengan perang, membela kejayaan dan kehormatan, dalam banyak kebudayaan menjadikan pelaku-pelakunya pahlawan yang disegani dan dihormati sepanjang sejarah manusia. Seperti dikatakan oleh Simone de Beauvoir mengenai superioritas laki-laki, mengorbankan jiwa untuk negara dianggap sebagai satu bentuk patriotisme yang tertinggi, sebuah tindakan dimana perempuan berada dipinggir.²

Politik internasional dipandang sebagai sebuah lingkungan dan wilayah yang berbahaya, pada umumnya negara menempatkan posisi membela keamanan nasional pada posisi yang tinggi di dalam prioritas kebijakan. Menurut Kenneth Waltz, dalam kondisi ini negara tengah menjalankan tugasnya di dalam "bayang-bayang kekerasan", sehingga perang dapat pecah setiap waktu.³ Atas nama keamanan nasional, negara telah menjustifikasi sejumlah besar dana untuk tujuan pertahanan negara, dengan mengambil alih prioritas anggaran dalam negeri, selain memberlakukan wajib militer kepada seluruh pemuda, menjaga invasi negara luar, dan mempersempit kebebasan sipil. Keamanan negara dipersepsikan sebagai sebuah nilai utama yang umumnya didukung tanpa pertanyaan oleh mayoritas warga negara, khususnya pada waktu perang. Sementara peran negara pada abad ke 20 telah berkembang sehingga menggantikan program-program sosial domestik, karena keamanan nasional sering kali dipandang lebih penting dari pada menjaga keamanan sosial individu-individu warga negara.

Asosiasi laki-laki lebih kuat dengan aktivitas-aktivitas membela negara dan mempertahankan kepentingan nasional baik sebagai tentara maupun diplomat. Bentuk keterlibatan perempuan digambarkan sebagai "mengatur" dan "memberikan rasa nyaman" dalam peran domestik. Peran tersebut digambarkan sebagai ibu dan penyedia kebutuhan pokok, dan dalam tugas-tugas yang sifatnya memberikan perawatan, seperti guru, perawat, dan pekerja sosial. Peran perempuan dalam menjaga keamanan nasional bersikap mendua; seperti yang didefinisikan dimana negara dan laki-laki sedang perjuangkan.

² Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, Chapter 3: The Point of View of Historical Materialism lihat di <http://www.marxists.org/reference/subjectethics/de-beauvoir/2nd-sex/introduction.htm>, diakses tanggal 2 November 2007.

³ Kenneth Waltz, *Man, The State and War*, Lexington, MA: Addison-Wesley, 1979.

perempuan memiliki kontrol yang sedikit sekali terhadap kondisi dan rasa amannya.

Seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan seolah-olah percaya bahwa kebijakan militer dan politik luar negeri merupakan wilayah pembuatan kebijakan yang tidak cocok untuk perempuan. Politik luar negeri mengandung unsur-unsur yang diasosiasikan dengan laki-laki dan maskulinitas seperti kekuatan, kekuasaan, otonomi, kebebasan dan rasionalitas. Karakteristik-karakteristik tersebut dipercayakan kepada laki-laki untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan membela kepentingan negara. Perempuan seringkali di-cap memiliki sifat-sifat naif, lemah dan seringkali tidak patriotis. Definisi patriotis pada umumnya juga diarahkan dan diasosiasikan dengan laki-laki, biasanya dalam sosok seorang prajurit yang berjuang membela negaranya, khususnya berjuang membela istri dan anak-anaknya dari gangguan musuh dari luar yang berbahaya. Bahkan perempuan yang mempunyai pengalaman luas dalam menanganai masalah-masalah politik luar negeri digambarkan sebagai sosok yang terlalu emosional dan terlalu lemah untuk menanganai masalah-masalah terkait dengan hidup atau mati yang menuntut pertahanan negara. Kelemahan selalu dianggap sebagai bahaya ketika masalah keamanan nasional menjadi taruhannya, terutama karena peranan Presiden yang juga merupakan Panglima Tertinggi memaksakan kepercayaan kita bahwa kualitas diasosiasikan dengan "kejantanan", sehingga menjadi kriteria yang penting dalam memilih seorang presiden.

Feminisme dalam Hubungan Internasional

Salah satu definisi mengenai feminisme mengatakan :

*Feminisme merupakan beberapa gerakan sosial, budaya dan politik, seperangkat teori dan filsafat moral yang terkait dengan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Feminisme juga digambarkan sebagai sebuah ideologi yang difokuskan terhadap kesetaraan sex.*⁴

Pada awalnya Feminisme merupakan suatu gerakan yang mengutamakan upaya perjuangan hak-hak politik dan legal dan kaum perempuan.⁵ Kemudian

⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism>, diakses tanggal 10 Oktober 2007.

⁵ Feminisme berasal dari bahasa Latin yang berarti perempuan. Di dalam feminisme terkandung adanya ideologi feminitas yaitu ideologi yang bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan. Feminitas tidak mutlak hanya dimiliki oleh kaum perempuan. Lihat di : <http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism>, diakses tanggal 10 Oktober 2007.

dalam perkembangannya, feminisme telah menjadi lebih dari usaha untuk memperjuangkan persamaan hak. Kini Feminisme berupaya keras untuk memperjuangkan martabat dan membebaskan perempuan dari belenggu struktur atau sistem yang eksploitatif dan subordinatif.

Hubungan intemasional, seperti disiplin-disiplin ilmu lainnya, memiliki konsep-konsep yang lebih bersifat maskulin dan pembahasan yang relatif sempit mengenai apa yang relevan dan yang tidak relevan dengan materi yang dipelajari. Karena kebijakan luar negeri dan militer paling banyak dilakukan oleh laki-laki, disiplin yang menganalisis aktivitas ini bersifat maskulin dan semuanya mengenai laki-laki. Maskulinitas disiplin ini karena yang tidak dimasukkan di dalam konsep-konsep tersebut adalah pengalaman kebanyakan perempuan. Penyebab utamanya karena perempuan tidak terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Padahal pengalaman-pengalaman langsung dari para pembuat kebijakan ini kemudian menjadi konsep-konsep tradisional hubungan intemasional yang kita kenal dewasa ini. Alasan lainnya adalah karena teori-teori hubungan intemasional telah dibangun oleh laki-laki yang bekerja melalui kaca mata dan sensibilitas maskulin. Tentu saja kedua hal tersebut menyebabkan ilmu hubungan intemasional menjadi bias gender, karena laki-laki dan perempuan berinteraksi dan bermasyarakat secara berbeda.⁶ Misalnya saja ketika hubungan intemasional membahas mengenai kekuasaan.

Salah satu text dari Hans J. Morgenthau dalam "Politics Among Nations", membahas tentang kekuasaan yang mengandung pengertian "penguasaan manusia atas manusia lainnya". Definisi ini merupakan hal yang lumrah dalam menjelaskan kekuasaan dalam disiplin ilmu hubungan intemasional. Nancy Hartsock mengajukan argumen bahwa tipe kekuasaan semacam "kekuasaan untuk mendominasi" ini selalu diasosiasikan dengan maskulinitas, karena penerapan kekuasaan pada umumnya merupakan aktivitas yang bersifat maskulin. Selain itu, jarang sekali perempuan menerapkan kekuasaan yang dilegitimasi di dalam ranah publik. Ketika perempuan menulis tentang kekuasaan, mereka akan menekankan pada energi, kapasitas, dan potensi. Harstock mencatat bahwa jika perempuan merancang teori, mereka akan menawarkan definisi yang sama, tetapi berbeda secara mendasar karena tidak identik dengan dominasi.⁷

Seorang feminis lainnya, Hannah Arendt, yang tulisan-tulisannya seringkali dikutip oleh para feminis ketika membahas tentang kekuasaan, mendefinisikan

⁶ Rebecca Grant dan Kathleen Newland (Ed), 1991, *Gender and International Relations*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, hal. 1.

⁷ Ann Tickner, 1991, "Hans Morgenthau's Principle of Political Realism: a Feminist Reformulation", dalam Rebecca Grant dan Kathleen Newland, *Gender and International Relations*, Indiana University Press, hal. 32.33.

kekuasaan sebagai "kemampuan manusia untuk bertindak bersama-sama, atau untuk melakukan tindakan terkait dengan kerjasama dengan orang lain yang memiliki cita-cita yang sama".⁸ Definisi kekuasaan semacam ini mirip dengan definisi yang diajukan oleh ahli psikologi David McClelland ketika menggambarkan kekuasaan perempuan, yang digambarkan sebagai "pembagian" dan bukannya tindakan asertif. Jane Jaquette mengajukan argumen bahwa, sejak perempuan memiliki akses yang minim terhadap instrumen-instrumen yang memakai kekerasan, mereka menjadi lebih beradaptasi dengan kekuasaan untuk mempersuasi, sehingga dapat dibandingkan dengan aktivitas domestik perempuan melalui cara membangun koalisi.⁹

Politik internasional selalu merupakan aktivitas berbasis gender dalam sistem negara modern. Istilah-istilah dalam ketatanegaraan dan hubungan internasional (misalnya kita menyebut negarawan yang berakhiran "wan", yang menunjukkan sifat-sifat maskulin), jarang sekali dipikirkan, meskipun dalam bidang-bidang pengetahuan lain, sifat-sifat manusia hampir selalu identik dengan sifat-sifat maskulin. Ilmu Hubungan Internasional menolak memperkenalkan gender dalam diskursusnya, dengan asumsi dan penjelasan bahwa hampir semuanya peristiwa merupakan aktivitas dan pengalaman laki-laki. Setiap upaya untuk memperkenalkan analisis gender yang lebih eksplisit ke dalam bidang kajian Hubungan Internasional harus diawali dengan diskusi tentang maskulinitas.

Maskulinitas dan politik sejak lama memiliki kaitan erat. Karakteristik-karakteristik maskulin seringkali diasosiasikan dengan kejantanan, ketegasan, keberanian, kekuasaan, kemandirian, dan kekuatan fisik. Sepanjang sejarah manusia, karakteristik semacam itu menjadi hal yang sangat dipentingkan dalam menangani politik, khususnya politik internasional. Seringkali kejantanan juga diasosiasikan dengan kekerasan dan pemakaian kekerasan, sebuah tipe sifat yang, jika diterapkan dalam bidang internasional, seringkali dipuji, terutama jika menyangkut upaya bela negara. Penghargaan terhadap kekuasaan laki-laki khususnya pemujaan terhadap pahlawan-pahlawan laki-laki, lebih jauh menyebabkan dikotomi gender daripada kondisi yang sebenarnya.¹⁰

⁸ Hannah Arendt, 1969, *On Violence*, New York, Harcourt, Brace and World, hal. 44. Definisi Arendt tentang kekuasaan terkait dengan disiplin ilmu Hubungan Internasional dibahas secara lebih mendalam di dalam buku karangan Jean Bethke Elstain, berjudul: *Reflections on War and Political Discourse: Realism, Just War and Feminism in a Nuclear Age*, *Political Theory*, Vol. 13, No. 1, February 1985, hal. 39-57.

⁹ Jane Jaquette, *Power as Ideology; a Feminist Analysis*, dalam Judith H. Stiehm (ed), *Women's View of the Political World of Men*, Doobs Ferry, New York, 1984.

¹⁰ Judith Hicks Stiehm (Ed), *Women's View of the Political World of Men*, Transnational Publisher, New York, 1984.

Akan tetapi, pernyataan diatas tidak sepenuhnya benar, seperti yang dikemukakan oleh R.W Connell, bahwa pencitraan yang sifatnya penyeragaman (stereotyping) ini tidak selalu cocok dengan laki-laki, sehingga Connell mengusulkan istilah "hegemoni maskulin", yaitu sebuah tipe maskulinitas dominan budaya yang dibedakan dari maskulinitas subordinat lainnya. Sama seperti runculnya konstruksi gender, konsep "hegemoni maskulin", merupakan sebuah konstruksi sosial budaya yang ideal, yang tidak sejalan dengan personalitas mayoritas laki-laki dalam- kehidupan nyata. Hegemoni maskulin ini dapat berlangsung karena masyarakat yang mempertahankan otoritas patriarkal dan melegitimasi tatanan sosial dan politik masyarakat. Hegemoni maskulin kemudian terus berlangsung melalui perlawanan terhadap beberapa sifat-sifat maskulin yang dipandang subordinat atau yang "kurang maskulin", seperti homoseksualitas, dan yang lebih penting, melalui pengurangan berbagai sifat-sifat feminin. Perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial diterapkari dengan memberlakukan sanksi-sanksi sosial, yaitu hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang memaksa mengakui superioritas laki-laki. Dalam kenyataan di masyarakat, tidak ada bentuk stereotypical citra gender seperti ini yang bentuknya lebih nyata daripada di dalam ranah politik internasional. Ciri-ciri maskulin dan hegemoni maskulin kemudian diproyeksikan di dalam sifat-sifat negara adikuasa, sebagai aktor internasional diukur dengan kemampuan persenjataan (power), kemandirian, dan otorioni.¹¹

Dalam perkembangan sejarahnya, awal perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui perbedaan biogis. Tetapi ketika kaum feminis memakai istilah gender sekarang, mereka tidak mengacu secara umum terhadap perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi dengan seperangkat karakter bentukan budaya dan karakteristik yang diasosiasikan dengan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik ini dapat bervariasi tergantung tempat dan waktu. Dalam pandangan ini, faktor-faktor biologis menentukan tingkah laku, tetapi tidak hares dipandang sebagai suatu ketentuan atau suatu hal yang alamiah, untuk menjustifikasi praktek, institusi, atau pilihan yang dapat terjadi dan bukan masalah yang sebenarnya. Telah banyak disadari bahwa gender dikonstruksikan berbeda-beda tergantung budaya dan sejarah. Dalam kebanyakan budaya perbedaan gender menjelaskan terdapatnya hubungan yang tidak seimbang dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Joan Scott mendefinisikan gender sebagai: "elemen konstitutif dari hubungan

¹¹ J. Ann Tickner, 1992, *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*, Columbia University Press, New York

sosial yang berdasarkan pada perbedaan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, dan "sebuah cara utama untuk menjelaskan hubungan kekuasaan". Sebenarnya diantara sarjana-sarjana yang memiliki pandangan feminis dapat dibedakan diantaranya yang memiliki keyakinan bahwa perbedaan gender telah memainkan peran penting dan mendasar dalam membentuk ketidaksetaraan struktural yang terdapat dalam sejarah manusia. Ketidakadilan inilah yang kemudian menghasilkan perbedaan dalam identifikasi diri, pemahaman manusia, status sosial, dan hubungan kekuasaan.¹²

Scott mengklaim bahwa cara pemahaman kita terhadap masalah gender menggambarkan hubungan kekuasaan misalnya melalui seperangkat konsep-konsep normatif yang menetapkan interpretasi arti dari simbol-simbol. Dalam budaya Barat, konsep-konsep ini mengambil bentuk oposisi binari¹³ yang mengkategorikan arti maskulinitas dan feminitas lalu melegitimasi seperangkat hubungan sosial yang tidak seimbang. Scott dan feminis kontemporer dewasa ini menilai bahwa melalui pemakaian bahasa, kita mempelajari dunia melalui oposisi binary ini. Pemahaman budaya Barat mengenai gender berdasarkan pada seperangkat perbedaan-perbedaan binary yang terbentuk secara budaya, seperti publik vs privat, objektif vs subjektif, diri sendiri vs orang lain, rasional vs emosional, otonomi vs hubungan eksternal, atau bentuk budaya versus terjadi secara alamiah. Masing-masing sifat secara tipikal diasosiasikan dengan maskulinitas dan yang kedua dengan feminitas. Scott mengklaim bahwa konstruksi hirarkis dari perbedaan-perbedaan ini dapat diambil dalam kualitas pasti dan permanen yang melanggengkan penjajahan terhadap perempuan, sehingga harus dilawan. Untuk melakukannya, kita harus menganalisis cara oposisi binari ini dipahami dalam berbagai konteks yang berbeda, dan bukannya menerima perbedaan-perbedaan tersebut sebagai konstruksi yang baku. Ketika banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi diasumsikan sebagai hal yang

¹² Joan Scott, *Gender and The Politics of History*, dalam : "Gender, A Useful Category of Historical Analysis", *The American Historical Review*, December 1986.

¹³ Dalam "critical theory", oposisi binari (atau sistem binari) merupakan sepasang perangkat teoritis. Dalam strukturalisme, sistem binari dilihat sebagai sebuah organisasi mendasar dalam filsafat manusia, budaya, dan bahasa. Kadang-kadang oposisi binari ini menyangkut hirarki, misalnya putih dengan hitam, dimana hitam digambarkan sebagai tanda kejahatan, kegelapan, bahaya, dll, sementara putih dipandang sebagai sesuatu yang bersih, suci, murni, kebaikan, dll. Contoh lainnya adalah rasional dengan emosional, yang mana rasional seringkali diasosiasikan dengan laki-laki, dan emosional (mengandung makna inferioritas) diasosiasikan dengan perempuan. Lihat di : http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_opposition, diakses tanggal 11 Oktober 2007, juga lihat di <http://www-as.phy.obiou.edu/~rouzie/307j/binary.html>, diakses tanggal 11 Oktober 2007,

alamiah atau yang sudah semestinya, kita dapat menilai bagaimana hubungan ketidaksetaraan gender dikonstruksikan dan dipertahankan dalam arena-arena yang berbeda dalam kehidupan publik dan individu. Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap gender sebagai salah satu kategori analisis, feminis kontemporer juga berkomitmen dengan kesetaraan gender sebagai sebuah tujuan social.

Tantangan dari Scott berlanjut dalam bidang ilmu Hubungan Internasional. Dengan segera dapat dideteksi adanya seperangkat konsep yang sama dari oposisi binari yang sifatnya hirerakis. Tetapi meskipun tampak seolah-olah terdapat hubungan yang nyata antara politik internasional dengan sifat-sifat maskulin seperti yang digambarkan diatas, bidang hubungan internasional merupakan bidang ilmu terakhir dalam ilmu sosial yang disentuh oleh analisis gender dan perspektif feminisme. Alasannya bukan karena bidang kajian gender itu bidang ilmu yang netral, atau analisis gender sifatnya tidak relevan dengan topik masalah yang dibahas seperti yang dipercaya oleh beberapa ahli, tetapi karena sifat politik internasional sepenuhnya maskulin sehingga bentuk hirarki gender tidak tampak.

Dalam kerangka oposisi binari, disiplin ilmu Hubungan Internasional membangun hubungan hirarki ketika memakai seperti "kita" dan "mereka", "di dalam" dan "di luar". Untuk mempertahankan diri dari dunia luar, maka perlu dilawan dengan pemakaian kekuasaan yang rasional. Dalam diskursus politik, hal ini diterjemahkan kedalam istilah stereotopikal mengenai "mereka" yang menempati dunia "luar". Seperti halnya dengan konsep perempuan sebagai "other" sex,¹⁴ orang asing seringkali digambarkan sebagai "orang lain", "orang kulit berwarna" dan "negara-negara tropis" seringkali digambarkan sebagai "tidak rasional", "emosional", "tidak stabil", dll, yang kesemuanya merupakan ciri-ciri yang sering diidentifikasi dengan perempuan. Konstruksi diskursus ini dan cara dimana kita diajarkan mengenai politik internasional hampir sama dengan cara kita disosialisasikan mengenai pemahaman mengenai perbedaan-perbedaan gender. Untuk mengabaikan konstruksi hirarki dan relevansinya dengan kekuasaan mereka berisiko mengabadikan hubungan antara dominasi dan subordinasi. Tetapi sebelum mulai menggambarkan bagaimana bentuk studi hubungan internasional jika studi mengenai gender dimasukkan sebagai kategori analisis utama, pertamanya akan diberikan tinjauan sejarah mengenai bidang ilmu tersebut seperti yang telah dikonstruksikan secara tradisional.

¹⁴ Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, diterjemahkan oleh H M Parshley, Penguin 1972; Bab I : Introduction, *Woman as Other*, lihat di : <http://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/2nd-sex/introduction.htm>, diakses tanggal 2 November 2007.

Teori Hubungan Internasional dalam Era Perang Dingin

Sejarawan E.H Carr mengklaim bahwa kehancuran pada akhir Perang Dunia ke II yang kemudian memotivasi dibangunnya disiplin Ilmu Hubungan Internasional.¹⁵ Sebelum tahun 1914 hubungan internasional umumnya menjadi perhatian para praktisi politik internasional profesional. Kemudian, setelah terjadi kehancuran besar-besaran setelah Perang Dunia I, muncul berbagai upaya untuk mencari cara baru mencegah perang dunia terulang lagi. Cita-cita untuk mewujudkan perdamaian dunia ini menuntut diterapkannya demokratisasi baik dalam hal teori maupun praktek hubungan internasional. Carr lebih lanjut mengatakan, bidang awal disiplin ilmu ini ditandai dengan keinginan kuat untuk mencegah pecahnya perang. Pada periode interval diantara dua Perang Dunia, ilmu Hubungan Internasional difokuskan isu-isu yang terkait dengan hukum internasional dan keamanan bersama (*collective security*), sehingga didirikannya Liga Bangsa Bangsa (LBB) dan berbagai organisasi internasional sebagai sebuah sistem keamanan bersama untuk mencegah konflik dimasa mendatang. Tetapi ketika pembatasan LBB dan sistem keamanan bersama dipandang sebagai faktor yang menyebabkan pecahnya PD II, disiplin ilmu Hubungan Internasional berubah seperti yang dicap sebagai realisme politik.

Maka dari itu disiplin ilmu Hubungan Internasional diawali sebagai bidang yang terkait dengan berbagai upaya untuk mencegah Perang Dunia yang tampaknya sulit untuk dihindari. Tetapi ketika sebuah PD II terbukti menghasilkan skala kerusakan yang lebih parah seperti yang terjadi sebelumnya, muncul angan-angan yang mengarah pada idealisme yang salah, sehingga memunculkan kebijakan pasifis oleh negara-negara Barat pada era tahun 1930an. Kebijakan pasifis ini menyebabkan beralihnya pendekatan beberapa sarjana kearah yang lebih realistis dalam memandang politik internasional. Selanjutnya para pendukung teori dan praktisi realis seperti George Kennan dan Henry Kissinger, menandai bahaya munculnya keinginan masyarakat dan pengaruh warga negara yang tidak terinformasikan mengenai politik luar negeri.¹⁶ Mereka mengusulkan agar melakukan kebijakan luar negeri melalui "tujuan" yang dirancang oleh elite yang telah memiliki batasan diri terhadap bahaya moralisme dan legalisme yang memunculkan pengaruh yang merusak seperti dalam pelaksanaan politik luar negeri sebelumnya. Kelompok realis mengklaim bahwa konflik tidak dapat

¹⁵ E.H. Carr, *The Twenty Years' Crisis, 1919-1939*, 2nd Edition, New York, Harper & Row

¹⁶ George Kennan, 1984, *American Diplomacy, Expanded Edition*, Univesity of Chicago Press.

dihindarkan, sehingga cara terbaik untuk menjamin keamanan negara adalah dengan mempersiapkan untuk berperang.¹⁷

Sementara kebanyakan sarjana kontemporer hubungan internasional telah memakai pemikiran dari Yunani Kuno dan ahli-ahli teori Barat modern seperti Macchiavelli, Hobbes, dan Rosseau, pokok perhatian kaum realis adalah masalah-masalah yang terkait dengan perang dan keamanan nasional dalam sistem internasional pasca Perang Dunia II. Pemikiran ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa antara tahun 1930an dan 1940-an ketika banyak muncul sarjana-sarjana hubungan internasional baru. Maka realisme politik khususnya terkait dengan upaya-upaya untuk menjelaskan sebab-sebab perang dunia dan jatuh-bangunnya sebuah bangsa. Pada umumnya orientasi para sarjana baru tersebut adalah Anglo-Amerika, sehingga realisme digambarkan oleh salah seorang penulis sebagai "bapak dari tradisi klasik". Pemikiran-pemikiran yang muncul telah mengkonsentrasikan investigasi mereka terhadap kegiatan-kegiatan untuk menyeimbangkan kekuasaan dari negara-negara besar.

Sebagai reaksi terhadap kegagalan tradisi "idealis" pada awal abad ke 20, kaum realis membuat asumsi dasar adanya sebuah dunia yang berbahaya tanpa otoritas yang berlebihan untuk mempertahankan perdamaian. Pada dunia yang "anarkis", realis mengusulkan agar adanya akumulasi kekuasaan dan kekuatan militer untuk menjamin keberlangsungan negara, menjaga wilayah domestik, dan untuk mencapai kepentingan nasional yang sesuai kaidah hukum yang berada di luar wilayah perbatasan negara. Kondisi Perang Dingin pada paruh kedua abad ke 21 mengarahkan sarjana-sarjana ini untuk memfokuskan perhatian pada hubungan US-AS, perlombaan persenjataan, dan menjamin dominasi negara-negara adikuasa.

Kritik Feminis terhadap Realisme

Pada awal dekade 1970an, konsep realisme dengan keras ditantang oleh menurunnya intensitas Perang Dingin dan meningkatnya harga minyak dunia secara dramatis. Peristiwa-peristiwa tersebut menurunkan perhatian terhadap masalah-masalah seperti perang dan damai dan hubungan AS-US di dalam agenda politik luar negeri tingkat tinggi. Tantangan terhadap keamanan nasional mencapai puncaknya ketika OPEC sebagai sebuah kartel perdagangan mengambil berbagai kebijakan yang memukul perekonomian negara-negara pengimpor minyak.

¹⁷ Colonel 3.3 Graham, *On War* by General Karl Von Clausewitz, translation, lihat di <http://www.clausewitz.com/CWZHOME/VomKriege2/ONWARTOC2.HTML>, diakses tanggal 1 November 2007.

Kemudian beberapa sarjana mengusulkan agar hubungan internasional perlu menaruh lebih banyak perhatian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan saling-ketergantungan ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan aktor-aktor bukan negara. Pemikiran mengenai interdependensi ini juga menantang fokus realisme politik yang selama ini lebih condong kepada konflik-konflik politik dan politik kekuasaan dalam sistem internasional. Mereka menuntut perhatian terhadap masalah-masalah hubungan antar negara, seperti AS dengan Canada atau Eropa Barat, di tempat-tempat dimana *kemungkinan* pecahnya perang sangat kecil. Para sarjana yang mendukung interdependensi mengklaim bahwa pendekatan tradisional tidak cocok untuk menjelaskan konflik ekonomi diantara negara-negara kapitalis maju.

Tantangan yang lebih besar terhadap realisme datang dari tradisi Marxisme. Ideologi Marxisme menekankan pada kesamaan dan keadilan dalam tata kelola dan pengawasan.¹⁸ Para sarjana memakai berbagai pendekatan yang lebih radikal sebagai upaya untuk mengalihkan bidang hubungan internasional dari fokus yang terlalu ke barat-baratan ke arah pertimbangan ke bidang-bidang yang selama ini termarginalisasikan di dalam sistem internasional. Usulan ini semakin menguat pada dekade tahun 1970an, ketika janji kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan di negara-negara yang baru merdeka tidak tercapai. Maka para sarjana mengarahkan perhatiannya pada upaya untuk memperbaiki sistem perekonomian dunia. Tujuan yang hendak dicapai adalah membangun sistem yang dapat menjembatani ketidaksetaraan pembangunan diantara dan di dalam satu negara. Beberapa teoritis ini mengklaim bahwa kondisi struktural yang dinamakan dependensi telah memposisikan negara-negara berkembang yang baru memperoleh kemerdekaan pada dekade tahun 1960-an ini ke dalam posisi periferi di dalam sistem internasional.

Lebih lanjut, sistem yang selama ini berlaku telah menempatkan dunia kedalam hubungan yang tidak seimbang dengan antara negara-negara yang menjadi pusat kekuasaan ekonomi dan politik dengan negara-negara pinggiran. Sistem pasar dunia telah menyebabkan negara-negara berkembang terabaikan dalam kegiatan pembangunan nasional yang otonom. Sebaliknya, kaum Marxis menekankan pada pembagian kelas-kelas, yang berpangkal pada kondisi pasar dunia yang tidak berdasarkan pada batas-batas negara. Maka para peneliti mengenai perdamaian mulai memakai istilah kekerasan struktural untuk menjelaskan kondisi dimana kelompok marginal dalam sistem internasional disalahkan karena memiliki tingkat harapan hidup yang lebih rendah melalui alokasi sumber daya yang tidak merata dalam sistem kapitalisme global.

¹⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Marxism>, diakses tanggal 2 November 2007.

Perkenalan dengan teori dan pendekatan kompetisi dan masuknya isu - isu baru dan aktor-aktor baru di dalam materi hubungan internasional diikuti oleh berubahnya pendekatan yang lebih normatif di dalam bidang ilmu ini. Misalnya, cara pandang tata kelola internasional memperlakukan bagaimana isu-isu kemanusiaan dapat mengurangi kecenderungan terjadinya kekerasan internasional. Upaya-upaya yang perlu dilakukan termasuk membangun kondisi minimal yang disepakati masyarakat internasional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat manusia, mewujudkan keadilan sosial, stabilisasi lingkungan hidup, dan menguatnya partisipasi demokratis dalam proses pengambilan keputusan.

Para peneliti manajemen internasional juga mempertanyakan apakah negara memiliki instrumen-instrumen yang memadai untuk memecahkan masalah yang beragam dalam agenda internasional. Keberadaan negara-negara yang dikuasai oleh rejim militer dapat menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri, selain menimbulkan ketidakadilan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan merupakan halangan untuk mendapatkan sumber daya alam. Sistem internasional yang saat ini berlangsung merupakan hasil dari beroperasinya kapitalisme global yang berada di luar pengawasan negara. Contohnya, perbatasan negara tidak dapat dilindungi ketika menghadapi isu polusi lingkungan. Masalah lingkungan hanya dapat ditangani oleh aksi bersama masyarakat internasional. Para peneliti kemudian menolak klaim para pendukung realisme politik mengenai konsep objektivitas dan positivisme dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Dengan mengadopsi contoh-contoh yang normatif, mereka kemudian mempostulasikan masa depan alternatif yang kemungkinan dapat menawarkan janji kesamaan dan keadilan, sambil memikirkan cara-cara agar cita-cita ini dapat dicapai.

Dalam realisme politik dan metodologi keilmuan, dapat dideteksi adanya orientasi yang terkait dengan beberapa karakteristik maskulin, seperti kekuasaan, otonomi, dan rasionalitas objektif. Tetapi diantara kritik terhadap realisme, tidak ada perhatian yang diberikan terhadap gender sebagai salah satu kategori analisis. Sarjana-sarjana yang membahas kekerasan struktural juga menaruh perhatian yang sedikit sekali terhadap bagaimana perempuan dipengaruhi oleh politik global atau bagaimana posisi marginal perempuan diakibatkan oleh bekerjanya sistem ekonomi global. Selain itu, terdapatnya fakta-fakta bahwa hubungan gender yang hirarkis terkait dengan bentuk-bentuk lain dominasi dialami kaum perempuan. Ketika membangun sebuah perspektif hubungan internasional yang membahas efek hirarki gender ini, harus dibangun teori-teori feminisme dari disiplin ilmu lain untuk melihat bagaimana bidang-bidang ilmu tersebut dapat berkontribusi terhadap pemahaman dalam kajian gender dalam hubungan internasional

Teori-teori Feminis dalam Isu Keamanan dan Lingkungan

Teori konvensional Hubungan Internasional telah terkonsentrasikan pada aktivitas aktor-aktor dalam negara-negara besar yang berada di dalam pusat sistem. Teori feminis, yang membahas berbagai pengalaman perempuan, yang biasanya berada di strata masyarakat tingkat bawah dalam kehidupan politik antar negara, dapat menawarkan beberapa cara pandang baru dalam sifat negara dan kebutuhan individual, khususnya mereka yang berada di lokasi pinggiran dalam sistem internasional. Perspektif feminisme, yang dibangun berdasarkan pengalaman perempuan, dapat menambahkan sebuah dimensi baru dalam pemahaman terhadap perekonomian dunia, karena perempuan seingkali menjadi kelompok yang pertama yang menjadi korban ketika terjadi krisis ekonomi. Selain itu, perlu juga dicari cara pandang baru dalam hubungan antara aktivitas militer dan kekerasan struktural.

Akan tetapi, para ahli teori feminis harus melangkah lebih jauh daripada sekedar memasukkan pengalaman perempuan kedalam berbagai disiplin dan berupaya untuk mempertanyakan konsep dasar dari disiplin itu sendiri. Konsep-konsep dasar dalam teori dan praktek dalam hubungan internasional, seperti kekuasaan, kedaulatan, dan keamanan, telah dirancang bentuk-bentuk dan istilah-istilahnya diasosiasikan dengan maskulinistas. Oleh sebab itu, menggambarkan teori feminis untuk menguji dan mengkritik arti konsep-konsep ini menjadi hal mendasar dalam politik internasional, yang dapat membantu kita untuk memformulasikan kembali konsep-konsep ini melalui cara yang memungkinkan untuk melihat dimensi-dimensi baru dalam memecahkan masalah hilangnya rasa aman seperti yang dialami sebagian besar umat manusia dewasa ini. Berikut ini adalah pembahasan mengenai pentingnya dimensi gender ketika membahas isu keamanan lingkungan.

Isu Gender dan Keamanan Lingkungan

Meskipun diakui bahwa isu lingkungan merupakan salah satu isu global penting, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, akan tetapi masalah lingkungan belum menjadi perhatian teori dan praktek hubungan internasional. Padahal, seperti yang telah disinggung pada bagian lain tulisan ini, lingkungan hidup telah menjadi isu global yang melewati batas-batas negara, sehingga menuntut aksi bersama. Peristiwa yang terjadi di salah satu negara, seringkali menuntut dibuatnya kebijakan global semua negara, mengingat bumi sebagai warisan bersama umat manusia. Aktor-aktor politik internasional tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap isu ini mengingat isu lingkungan tidak cocok dengan aktivitas-aktivitas "maskulin" seperti membangun dan mempertahankan kekuasaan, atau memperluas pengaruh.

Barry Commoner, seorang ahli biologi dan aktivis lingkungan dari Amerika Serikat, mendefinisikan manajemen lingkungan sebagai ilmu "mengatur rumah tangga global", sehingga tidak menjadi hirauan real politik.¹⁹ Metafora seperti itu menegaskan gambaran kegiatan "mengatur rumah tangga" yang identik dengan tugas perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan menangani masalah-masalah yang berada di "wilayah publik" yang lebih "penting", seperti diplomasi dan keamanan nasional. Lingkungan hidup di dalam budaya Indonesia, dan bahkan di dalam kebudayaan lain seringkali digambarkan sebagai "ibu pertiwi" atau "the mother earth", sehingga tidak menarik bagi aktivitas-aktivitas yang menuntut keseriusan penanganan, misalnya politik antar-negara dan peperangan. Maka dari itu, tidak memadainya perhatian yang diberikan terhadap masalah-masalah lingkungan, selain membisunya perempuan dalam masalah-masalah internasional, merupakan perpaduan yang sesuai yang semakin menegaskan bahwa isu lingkungan bukanlah merupakan fokus penting politik internasional.

Istilah "ekonologi" berarti studi tentang kehidupan di dalam rumah, berdasarkan pada akar bahasa Yunani yang berarti "rumah". Pengertian ekologi saat ini mengacu pada hubungan timbal-balik antara organisme hidup dengan lingkungannya. Definisi ini menggambarkan citra sebuah ruang domestik yang secara tradisional dihuni oleh perempuan, anak-anak dan pembantu rumah tangga. Ekologi menekankan pada keseluruhan dan ieproduksi dan metafora seperti "global housekeeping" yang lebih terkait dengan pengalaman-pengalaman perempuan daripada dengan dunia laki-laki.

Di lain pihak, Ekologi juga dipandang secara ambivalen oleh kelompok feminis. Kebanyakan dari mereka curiga terhadap konsep ekologi dan ekofeminisme karena menganggap ada kaitan lama antara alam dan perempuan, dimana keduanya dianggap sebagai dasar penindasan yang berkepanjangan terhadap perempuan. Kaum sosialis-feminis khususnya mengkritisi apa yang mereka pandang sebagai kecenderungan eko-feminisme untuk menclasari perempuan dan menaturalisasikan peran reproduktif dan domestiknya. Kecenderungan seperti ini semakin mengabadikan hirarki dualistik seperti yang digambarkan sebelumnya, bahwa kebanyakan feminis percaya bahwa peran hirarkis hams dihapuskan jika kesetaraan *gender* ingin dicapai. Beberapa ilmuwan eko-feminis menolak hubungan mendasar antara perempuan dan alam ini.

Dengan mempercayai bahwa terjadinya penindasan terhadap perempuan dan dominasi manusia terhadap alam keduanya merupakan produk dari sistem patriarki. Para pendukung aliran eko-feminis ini mengklaim bahwa hubungan harus dibuat lebih eksplisit jika manusia ingin mengatasi struktur dominasi antara alam dengan dunia manusia. Untuk alasan ini, perspektif feminis lingkungan dapat menawarkan sebuah tinjauan baru menuju pemikiran tentang lingkungan alam,

¹⁹ <http://www.answers.com/topic/barry-commoner>, diakses tanggal 2 November 2009

pandangan yang berguna sebagai masukan untuk mencapai keamanan lingkungan global.

Sejak diperkenalkan pada abad ke 7 di Eropa, sistem negara modern mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan lingkungan hidup. Sumber daya alam dan ruang geografis dipandang sebagai sumber daya untuk meningkatkan kekuasaan dan kejayaan sebuah negara. Mengenai hal ini Barry Commoner menulis sebagai berikut:

"Manusia telah keluar dari lingkaran kehidupan, (Manusia) telah didorong bukan oleh kebutuhan biologis, akan tetapi oleh organisasi sosial yang mengharuskan mereka untuk "menaklukkan alam"...Kita harus belajar mencari upaya-upaya merestorasi dan mengembalikan kekayaan yang kita pinjam dari alam"²⁰

Pernyataan Commoner tersebut seolah-olah menggambarkan keprihatinannya yang mendalam mengenai sifat-sifat manusia yang merusak alam demi mengejar kepentingan-kepentingan politiknya. cara pandang maskulinitas terhadap lingkungan selama ini dipandang sebagai mesin yang dapat dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya kepentingan manusia. Kerusakan lingkungan dewasa ini, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa perlu cara pandang feminin, yang lebih memusatkan pada upaya-upaya merawat, memelihara, dan memperbaharui lingkungan yang rusak.

Para penulis feminis seperti Carolyn Merchant dan Evelyn Fox-Keller menggambarkan sebuah perubahan mendasar dalam sikap masyarakat keilmuan di Barat tentang lingkungan alam yang juga dimulai di Eropa pada abad ke 17. Sebelum revolusi keilmuan ini, alam dipandang sebagai sebuah sistem dengan manusia sehingga terbentuk sebuah bagian integral. Pada abad ke 17, ketika manusia menjadi semakin berkuasa, alam kemudian dipandang sebagai mesin untuk dieksploitasi demi kepentingan manusia. Pandangan mekanis tentang alam ini cocok dengan sistem internasional yang semakin kompetitif, dimana bumi terbagi atas unit-unit politik yang saling bersaing, yang masing-masing berusaha untuk memperbesar kekuasaan dengan cara mengamankan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya alam, kalau perlu dengan melakukan ekspansi geografis melalui pendudukan, kolonialisme, dengan memakai cara-cara kekerasan.

Maka persepsi tentang alampun telah berubah, dari alam yang dipandang sebagai sebuah organisme hidup menjadi mesin yang dieksploitasi telah diikuti dengan perubahan sikap terhadap perempuan yang hidupnya pelan-pelan dipindahkan ke ruang-ruang domestik. Pemandangan tersebut membuat posisi perempuan semakin termarginalisasi dari sistem produksi. Perubahan-perubahan ini dapat dikaitkan dengan sikap mengejar keamanan dari sistem negara yang eskpansif, dimana kolonialisasi telah menyebabkan

²⁰ Barry Commoner, dalam *The Closing Circle*", lihat di : <http://www.answers.com/topic/barry-commoner>, diakses tanggal 2 November 2007.

perubahan-perubahan aktivitas-aktivitas ekonomi di dalam ruang geografis yang lebih luas. Proses untuk mencapai keamanan internasional ini menghadapi bahaya bagi keamanan lingkungan dan penghuni-penghuninya, baik laki-laki, maupun perempuan.

Selanjutnya, meningkatnya sistem ekonomi pasar dan kebutuhan untuk semakin memperbesar kepemilikan terhadap sumber-sumber daya alam, juga menjadi faktor pendorong ekspansionisme. Hal ini muncul bersamaan dengan visi baru untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, yang telah menjadi motivator yang kuat di dalam sistem negara bangsa. Oleh alasan-alasan itulah negara-negara Eropa mulai melakukan ekspansi dan mengembangkan kolonisasi di luar batas-batas negara-negaranya. Tujuan ekspansi di luar negeri, khususnya ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, adalah untuk mendapatkan kekayaan tambahan dan sumber-sumber daya alam yang baru. Merchant menggambarkan hal ini sebagai sebuah krisis ekologis, yang diawali oleh berkembangnya industri pembangunan kapal taut, sebuah industri yang sangat penting artinya untuk melakukan ekspansi perdagangan dan mengejar supremasi nasional, yang telah dimulai sejak awal abad ke 16. Pembangunan kapal-kapal dagang ini sangat tergantung pada keberadaan kayu oak, sehingga menyebabkan kurangnya pasokan kayu yang luar biasa di banyak negara Eropa. Faktor inilah yang kemudian memaksa Eropa untuk beralih ke pertambangan batu bara sebagai sumber bahan bakar alternatif.

Ketika negara-negara Eropa mulai berlayar keluar batas-batas negaranya, maka dimulailah eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam atas nama kemajuan kemanusiaan, ke dalam dimensi yang lebih luas, sehingga memulai sebuah proses yang mencapai titik puncak pada abad ke 20. Masa itu dunia menghadapi ketergantungan sumber daya alam global sehingga terjadi persaingan internasional dan konflik untuk memperebutkan sumber-sumber alam yang langka. Ketika krisis ekologi mulai mencapai skala internasional, visi kemanusiaan untuk mengalahkan alam telah berkembang diluar bumi menuju luar angkasa. Ada keinginan untuk mendapatkan sumber sumber alam di bulan.

Meskipun meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah lingkungan merupakan isu marginal, pendekatan para ilmuwan konvensional hubungan internasional telah mengasumsikan bahwa sumber daya alam merupakan elemen penting kekuasaan negara sehingga vital artinya bagi keamanan nasional. Baru-baru ini, pemikiran—pemikiran baru dalam hubungan internasional telah mulai mempertanyakan asumsi-asumsi ini: tekanan yang sekarang dipandang sebagai sebuah keterbatasan sumber daya alam, juga ketidakmampuan negara untuk menangani masalah kerusakan lingkungan, sehingga mengancam keamanan semua negara, kaya maupun miskin.

Pemikir-pemikir ini juga meminta perhatian pada ketidaksetaraan internasional yang diasosiasikan dengan kerusakan lingkungan dan upaya untuk memvisualisasikan ulang ruang geopolitik dan batas-batas negara dari sudut pandang lingkungan.

Hans Morgenthau, seorang pemikir realis dalam hubungan internasional, dalam bukunya yang terkenal: "*Politics Among Nations*", hanya sedikit sekali membahas mengenai lingkungan alam. Tidak mengherankan mengingat isu-isu yang oleh kaum realis disebut sebagai "low politics" ini merupakan hal yang lumrah pada text-text yang ditulis oleh teoritis tradisional hubungan internasional.²¹ Pembahasan Hans Morgenthau tentang sumber daya alam hanya disinggung jika terdapat kaitan dan peran sebagai elemen dasar penunjang kekuasaan negara. Morgenthau menekankan pentingnya kepemilikan sumber daya alam yang mencukupi untuk mendukung kekuatan negara, khususnya pada waktu perang. Lebih lanjut Morgenthau menggambarkan pergeseran sejarah yang dramatis, seperti hilangnya Timur Dekat dan Afrika Utara sebagai pusat kekuasaan, yang kemudian diambil alih oleh munculnya kekuasaan-kekuasaan baru, seperti Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada era Perang Dingin. Hilangnya negara-negara tersebut dari peta penguasa dunia, antara lain disebabkan oleh menurunnya produktivitas pertanian di negaranegara tersebut.²²

Konsisten dengan tradisi geopolitis Eropa pada awal abad ke 20, Morgenthau mengklaim bahwa status AS sebagai negara adikuasa sebagian karena posisi geografisnya yang menguntungkan dalam sistem internasional. Sebagai benua yang dilindungi oleh samudera di kedua sisinya, AS memiliki posisi

²¹ Nancy Hartsock, dalam Rebecca Grant dan Kathleen Newland, *Gender and International Relations*, Indiana University Press, hal. 32.

²² Paul Kennedy, *The Rise and Falls of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, Random House, 1987. Lihat di : http://www.amazon.com/gp/reader/0679720197/ref=sib_dp_pt/105-3107521-3929258#reader-link, diakses tanggal 2 November 2007.

menguntungkan disepanjang abad ke 20, khususnya terlindung dari ancaman nuklir yang dashyat. Cam pandang Morgenthau dan geopolitik menjadi ciri penting bagaimana para pembuat teori hubungan intemasional di Eropa Barat merupakan pemegang tradisi yang dominan. Dalam ssitem hubungan intemasional yang hirarkis, akses terhadap sumber daya alam dan posisi geografis yang menguntungkan menjadi elemen kunci untuk mencapai kekuasaan negara. Bagi negara-negara yang mempunyai kemampuan untuk itu, aset-aset geografis ini hams dilindungi dengan cara-cara militer dan ditingkatkan dengan cara ekspansi ke luar negeri atau perebutan wilayah jika diperlukan.

Kesimpulan

Ilmu hubungan intemasional masih bersifat bias gender dan berorientasi maskulin. Aktivitas politik internasional, baik perancangan kebijakan luar negeri maupun pelaksanaannya masih didominasi oleh laki-laki, sehingga digambarkan sebagai "dunia yang beiorientasi lak-laki". Cara pandang ini menyebabkan berbagai isu internasional ditinjau melalui cara pandang, pengalaman, dan sensitivitas laki-laki. Cara pandang tradisional tentang keamanan nasional telah mengalami disfungsi, karena titik berat terhadap militer dalam keamanan nasional semakin menurunkan tingkat keamanan individu. Dalam praktek politik luar negeri dewasa ini, tidak ada jaminan terhadap hak-hak individu selain kerusakan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk ketidakamanan ini berpengaruh terhadap keamanan individu termasuk konflik etnis, kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, dan rusaknya lingkungan. Semua bentuk ketidakamanan ini dapat dikaitkan dengan sistem internasional, tetapi upaya-upaya penanggulangannya belum menjadi bagian dari program negara dalam mendefinsikan tujuan keamanan nasionalnya.

Berbagai bentuk ketidakamanan militer, ekonomi, lingkungan, terkait dengan ketidaksetaraan gender antara pemberi rasa aman dan penerima. Versi militeristik keamanan lebih memihak pada karakteristik maskulin dan mengangkat posisi laki-laki menuju status warga negara kelas satu karena peran mereka sebagai pemberi rasa aman. Sebuah analisis ketidakamanan ekonomi menunjukkan pola ketidaksetaraan gender dalam perekonomian dunia. Pola seperti ini dapat dilihat misalnya dalam pembagian keka,yaan dunia dan sistem pasar dunia yang semakin mempertegas hirarki negara selain memperbesar jurang negara-negara kaya dan miskin. Dalam hal keamanan lingkungan, posisi hubungan tradisional antara perempuan dan alam, menempatkan keduanya di dalarn' posisi subordinat terhadap laki-laki. Hal ini terefleksikan dan memperoleh dukungan untuk menjalankan berbagai instrumen eksploitatif yang menempatkan lingkungan sebagai mesin yang

dapat dieksploitasi demi kepentingan segelintir negara industri maju. Sikap seperti inilah yang merupakan penyebab ketidakamanan ekologi dewasa ini.

Dalam sistem internasional yang terdiri atas unit-unit politik yang berdiri sendiri, pembahasan tentang sumber daya alam mengarah pada kompetisi politis dan konflik. Ekspansi negara-negara Eropa dan imperialisme pada abad ke 17 menjustifikasi untuk menjalankan proyek-proyek imperialis Eropa. Orang-orang Eropa percaya bahwa yang mereka lakukan adalah proyek pencerahan bagi bangsa-bangsa subordinat yang belum beradab, dan bahwa mentransformasikan lingkungan dengan memakai ukuran Eropa adalah demi kemajuan umat manusia. Justifikasi kolonialisme juga terjadi karena penduduk asli tidak dianggap mampu menterjemahkan modernisasi. Maka posisi marginal diberikan terhadap perempuan dan alam oleh masyarakat Eropa modern, kemudian diperluas dan diaplikasikan ke budaya dan ras lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Upaya memformulasikan ulang konsep-konsep dalam ilmu hubungan internasional perlu dilakukan, mengingat posisinya sebagai sebuah disiplin yang menganalisis keamanan internasional. Tulisan ini mengkritik teori-teori hubungan internasional konvensional, kaum environmentalis, dan pembuat kebijakan yang masih berorientasi pada tinjauan maskulin. Tetapi ketika keamanan lebih difokuskan pada keamanan individu dan lingkungan, analisis gender perlu dipergunakan sebagai pilihan kategori. Lebih lanjut, reformulasi konsep-konsep keamanan tradisional perlu disesuaikan dengan cara pandang dan pengalaman perempuan.

Analisis diatas telah menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan ketidakamanan militer, ekonomi dan ekologis tidak dapat berhasil sepenuhnya sampai hubungan sosial yang hirarkis, termasuk hubungan gender, diakui dan secara mendasar ditangani. Maka tercapainya perdamaian, ekonomi, keadilan, dan kesinambungan internasional tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya mengatasi hubungan sosial dari dominasi dan subordinasi. Rasa aman yang sesungguhnya menuntut tidak saja absennya perang, tetapi juga penghapusan hubungan sosial yang tidak adil, termasuk hubungan gender yang tidak seimbang.

Daftar Referensi

Buku-buku

- Arendt, Hannah, 1969, *On Violence*, New York, Harcourt, Brace and World, NYC.
- Carr, E.H, *The Twenty Years' Crisis, 1919-1939* , 2nd Edition, Harper & Row, NYC.
- De Beauvoir, Simone, *The Second Sex*, diterjemahkan oleh H M Parshley, Penguin 1972.
- Grant, Rebecca dan Kathleen Newland, *Gender and International Relations*, Indiana University Press, 1991.
- Jacquette, Jane, *Power as Ideology; a Feminist Analysis*, dalam Judith H. Stiehm (ed), *Women's View of the Political World of Men*, Doobs Ferry, New York, 1984.
- Fakih, Mansour, 2005, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hartsock, Nancy, dalam Rebecca Grant dan Kathleen Newland, *Gender and International Relations*, Indiana University Press:
- George Kennan, 1984, *American Diplomacy, Expanded Edition*, University of Chicago Press.
- Keneddy, Paul, *The Rise and Falls of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, Random House, 1987. Lihat di : Tickner, J. Ann, *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*, Columbia University Press, New York, 1992.
- Tickner, Ann, 1991, "Hans Morgenthau's Principle of Political Realism: a Feminist Reformulation", dalam Rebecca Grant dan Kathleen Newland, *Gender and International Relations*, Indiana University Press.
- Tong, Rosemary, dan Nancy Tuana (eds), 1995, *Feminism and Philosophy*, Westview Press.

Saptari, Ratna, dan Brigitte Holzner, 1997. *Perempuan Bekerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar, Studi Perempuan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 49.

Stiehm, Judith Hicks, 1984, *Women's Views on the Political World of Men*, Transnational Publisher, New York.

Tong, Rosemary Tong, 1998, *Feminist Thought*, Westview Press, 1998.

Kenneth Waltz, *Man, The State and War*, Lexington, MA: Addison-Wesley, 1979.

Jurnal

Scott, Joan, *Gender and The Politics of History*, dalam : "Gender, A Useful Category of Historical Analysis", *The American Historical Review*, December 1986.

Elstain, Jean Bethke, *Reflections on War and Political Discourse: Realism, Just War and Feminism in a Nuclear Age*", *Political Theory*, Vol. 13, No. 1, February 1985.

Hadiz, Liza, 1998, *Feminisme Radikal dalam Politik dan Gejolak Perempuan*, *Jurnal Perempuan*, Edisi 7, Mei — Juli 1998, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Website: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/29/swara/1402613.htm>,
<http://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/2nd-sex/introduction.htm>,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism>,

<http://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/2nd-sex/introduction.htm>

<http://www.clausewitz.com/CWZHOMENomKriege2/ONVVARTOC2.HTML>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Marxism>

http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci

[http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory_\(Frankfurt_School\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory_(Frankfurt_School))

<http://www.answers.com/topic/barry-commoner>

http://www.amazon.com/gp/reader/0679720197/ref--sib_dp_pt/105-3107521-3929258#reader-link

Redefinisi Ilmu Hubungan Internasional dalam Perspektif Gender

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[downloadily.com](#)

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On